

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM merupakan usaha yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk melakukan pelayanan perekonomian secara luas kepada masyarakat serta memperluas lapangan kerja. Sedangkan menurut UU No. 20 Tahun 2008, UMKM dapat diartikan sebagai:

- a. Usaha yang didirikan untuk tujuan kegiatan ekonomi dan bukan kegiatan nirlaba;
- b. Usaha yang bersifat produktif atau menghasilkan keuntungan atau laba dari usaha;
- c. Usaha yang mandiri atau berdiri sendiri bukan bagian, cabang, ataupun afiliasi dari usaha lain;
- d. Usaha yang dimiliki oleh perseorangan ataupun badan usaha.

Dikutip dari www.ukmindonesia.id, Kementerian Koperasi dan UKM RI melaporkan bahwa secara jumlah unit, UMKM memiliki pangsa sekitar 99,99% (62.9 juta unit) dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia (2017), sementara usaha besar hanya sebanyak 0,01% atau sekitar 5400 unit. Usaha Mikro menyerap sekitar 107,2 juta tenaga kerja (89,2%), Usaha Kecil 5,7 juta (4,74%), dan Usaha Menengah 3,73 juta (3,11%); sementara Usaha Besar menyerap sekitar 3,58 juta jiwa. Artinya secara gabungan UMKM menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional, sementara Usaha Besar hanya menyerap sekitar 3% dari total tenaga

kerja nasional.¹ Ini tentu saja merupakan jumlah yang sangat besar. Tapi sayangnya, nasib UMKM di Indonesia saat ini belum cukup baik.

Timbulnya beragam permasalahan sangat berkaitan erat dengan keberadaan pendamping atau fasilitator dalam mendampingi UMKM. Minimnya bimbingan menjadikan UMKM sulit untuk berkembang karena faktor-faktor tersebut diatas. Dengan kata lain, kemajuan UMKM sangat ditentukan oleh besar kecilnya peran pendamping di lapangan.

Berdasarkan pengamatan dan pengalaman dalam memberikan konsultasi atau pendampingan, terdapat beberapa jenis kendala atau permasalahan yang sering dikeluhkan oleh UMKM, yaitu:

1. Kualitas sumber daya manusia UMKM yang masih rendah serta minimnya pengetahuan dan kompetensi kewirausahaan mengakibatkan rendahnya produktivitas usaha dan tenaga kerja. Hal tersebut juga tampak pada ketidakmampuan mereka dalam hal manajemen usaha, terutama dalam hal tata tertib pencatatan / pembukuan.
2. Banyak UMKM yang belum memiliki badan hukum yang jelas. Sebagian UMKM juga kurang memiliki pengetahuan tentang aspek legalitas dan perizinan, termasuk persyaratan yang harus dipenuhi dan prosedur yang ditempuh dalam proses pengurusannya.
3. Kurangnya inovasi produk. UMKM dinilai masih kurang menguasai teknologi, manajemen, informasi dan pasar. Sedangkan untuk memenuhi

¹ Komarudin, Ade, Politik Hukum Integratif UMKM, Kebijakan Negara Membuat UMKM Maju dan Berdaya Saing, (Jakarta: PT Semesta Rakyat Merdeka, 2014).

kebutuhan tersebut, UMKM memerlukan biaya yang relatif besar, apalagi jika dikelola secara mandiri.

4. UMKM juga masih menghadapi kendala dalam hal akses modal dan pendanaan. Akibatnya, UMKM kesulitan dalam meningkatkan kapasitas usahanya atau mengembangkan produk-produk yang mampu bersaing. Sebagian besar UMKM belum cukup tersentuh oleh pelayanan lembaga keuangan formal (bank). Sehingga tidak sedikit dari UMKM terpaksa memanfaatkan jasa lembaga keuangan mikro yang tradisional -meskipun dengan beban dan resiko yang cukup memberatkan- demi mempertahankan kelangsungan hidup usahanya.
5. Kurangnya tenaga pendamping di lapangan menyebabkan banyak UMKM yang belum tersentuh layanan konsultasi dan pendampingan. Dengan demikian, sangat dibutuhkan kehadiran lembaga pengembangan bisnis untuk memfasilitasi pelaku UMKM dan memberikan layanan sesuai kebutuhan mereka.²

Banyak sekali kendala yang dihadapi oleh para UMKM, mulai dari hal dasar seperti perizinan, pemodalannya, hingga kualitas sumber daya manusia. Ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perkembangan UMKM di Indonesia masih sangat lambat. Padahal, UMKM dapat menjadi pilar perekonomian yang akan membawa Indonesia lebih maju dan bersaing.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sesuai dengan penilaian dari IMF tahun 2016, berada pada kisaran 5%. Pertumbuhan tersebut sebenarnya sudah cukup

² Ussisa, Ussi. 2015. Problematika Apa Saja yang Dihadapi UMKM di Indonesia?.
www.kompasiana.com

tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Namun, bagi Indonesia, hal tersebut belum dapat membawa Indonesia keluar dari zona *middle income trap*.

Peran pemerintah sangat penting disini, dimana pemerintah sebagai pemegang kebijakan seharusnya mampu lebih mendorong perkembangan UMKM. Pemerintah juga sebenarnya telah banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung perkembangan UMKM, contohnya adalah program yang mempermudah akses modal, contohnya KUR (Kredit Usaha Rakyat). Namun program-program tersebut belum dapat mendobrak perkembangan UMKM secara signifikan.

Dalam upaya peningkatan kehidupan ekonomi, individu, dan anggota masyarakat tidak hanya tergantung pada peranan pasar melalui sektor swasta. Peran pemerintah dan mekanisme pasar (interaksi permintaan dan penawaran pasar) merupakan hal yang bersifat komplementer (bukan substitusi) dengan pelaku ekonomi lainnya. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi (rumah tangga pemerintah), memiliki fungsi penting dalam perekonomian yaitu berfungsi sebagai stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

- A. Fungsi Stabilisasi, yakni fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.
- B. Fungsi Alokasi, yakni fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon.

C. Fungsi Distribusi, yakni fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat.

Menurut Monitor Deloitte (2017), untuk menumbuhkembangkan kewirausahaan, ada empat hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah Indonesia yaitu

1. Aset Kewirausahaan, pemerintah mengatur agar UMKM bisa meningkatkan aset yang mereka miliki melalui akses ke pembiayaan, peningkatan kapabilitas / keahlian serta penguatan infrastruktur pendukung & teknologi
2. Layanan Bisnis, pemerintah menyediakan layanan penunjang berupaprogram pendampingan, pengembangan bisnis dan komersialisasi teknologi
3. Akselerasi Bisnis, pemerintah membantu UMKM untuk mengakselerasi pertumbuhan bisnis melalui pemberian insentif pajak / fiskal, menumbuhkan iklim persaingan yang sehat dan memotong biaya administrasi yang tidak perlu
4. Motivasi, pemerintah merubah / membentuk pola pikir yang positif tentang wirausaha.

Selain dari segi modal, faktor lainnya yang menyebabkan perkembangan UMKM di Indonesia lambat adalah masih kurangnya “melek teknologi”. Dikutip dari economy.okezone.com, UMKM di Indonesia yang sudah go digital hanya dikisaran 5%.

Pemerintah desa sebagai salah satu pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat, berperan sangat penting terhadap perkembangan UMKM di Indonesia.

Dorongan dan dukungan dalam berbagai faktor sangat diperlukan oleh para pelaku UMKM untuk terus berkembang hingga dapat memajukan Indonesia. Dengan dukungan dari pemerintah setempat, perkembangan UMKM dapat meningkat dengan signifikan.

Desa Sariwangi merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Sariwangi kabupaten Tasikmalaya. Jumlah penduduk di desa Sariwangi sejumlah 3.220 orang yang tersebar di 3 dusun, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Penduduk

NO	Kedusunan	Jumlah		Jumlah KK	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH
		RW	RT		L	P	
1	Kertasari	1	6	387	644	697	1341
2	Bojongpetir	1	5	265	456	458	914
3	Leuwipeusing	1	4	255	493	482	975
JUMLAH		3	15	907	1615	1642	3257

Sumber : Database Desa Sariwangi

Menurut data yang diperoleh, terdapat 11 UMKM yang tersebar di beberapa dusun di desa Sariwangi. Semua UMKM tersebut bergerak di bidang makanan. Dengan mayoritas memproduksi Keripik Bawang. Salah satu manfaat yang dirasakan oleh masyarakat desa dengan adanya UMKM tersebut adalah adanya penyerapan tenaga kerja. Ini menunjukkan UMKM yang ada di desa ini dapat mensejahterakan masyarakat dengan menyerap tenaga kerja dari internal desa.

Namun fakta di lapangan menunjukkan, bahwa UMKM di desa Sariwangi ini belum cukup berkembang. Bahkan terdapat UMKM yang sudah lama berjalan namun belum menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Disinilah peran pemerintah desa diperlukan untuk memajukan UMKM.

Kepala desa Sariwangi saat ini masih terbilang sangat muda, yaitu berumur 30 tahun. Menurut pegawai-pegawainya, kepala desa tersebut masih belum memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi, sehingga dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala desa belum maksimal. Ini tentu saja berpengaruh terhadap masyarakat di desa Sariwangi, khususnya kepada para pelaku UMKM. Tidak adanya pengawasan yang baik serta dukungan yang penuh terhadap UMKM yang berpotensi, membuat UMKM di desa Sariwangi sulit untuk berkembang.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul **“Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Desa Sariwangi Kecamatan Sariwangi Tahun 2015-2019”**.

1.2 Perumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti penulis yaitu :

1. Bagaimana gaya kepemimpinan kepala desa Sariwangi dalam pemberdayaan masyarakat khususnya di bidang UMKM?
2. Bagaimana pemberdayaan umkm yang dilakukan kepala desa Sariwangi?

1.3 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini, penulis melakukan pembatasan terhadap permasalahan yang ada dan telah dirumuskan agar terarah dan terkonsentrasi dalam melakukan

penelitian. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah narasumber penelitian hanya UMKM yang ada di desa Sariwangi.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak peneliti capai ialah diharapkan mampu menjelaskan bagaimana peran kepemimpinan kepala desa terhadap pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam pertumbuhan ekonomi lokal.

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, penulis berharap dapat berguna di kemudian hari untuk beberapa pihak yang membutuhkannya.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi masukan untuk pemerintah desa dalam meningkatkan perkembangan UMKM.